

**DINAMIKA PARTISIPASI PADA KELOMPOK TANI
HUTAN BUKIT INDAH DAN KELOMPOK TANI
HUTAN MATTIROBULU DALAM PENGELOLAAN
HKM BANGKENG BUKIT DI KECAMATAN
GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA**

**Oleh:
A. ANISA
M011171055**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

DINAMIKA PARTISIPASI PADA KELOMPOK TANI HUTAN BUKIT INDAH DAN KELOMPOK TANI HUTAN MATTIROBULU DALAM PENGELOLAAN HKM BANGKENG BUKIT DI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA

Disusun dan Diajukan Oleh:

A. Anisa

M011171055

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan

Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 15 Juli 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

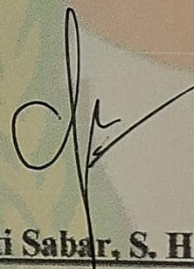
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M. Si

NIP. 19671005199103 1 006

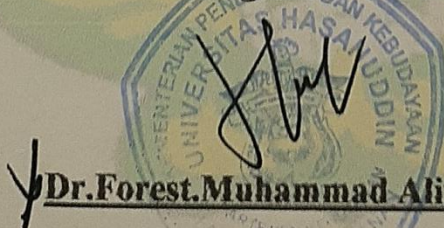


Ir. Adrayanti Sabar, S. Hut, M.P, IPM

NIP. 19850916201807 4 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kehutanan



Dr. Forest. Muhammad Alif K.S. S.Hut

NIP. 197990831200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Anisa
NIM : M011171055
Prodi : Kehutanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

“Dinamika Partisipasi pada Kelompok Tani Hutan Bukit Indah dan Kelompok Tani Hutan Mattirobulu dalam Pengelolaan HKm Bangkeng Bukit di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 6 Agustus 2021



A. Anisa

ABSTRAK

A. Anisa (M011171055). Dinamika Partisipasi pada Kelompok Tani Hutan Bukit Indah dan Kelompok Tani Hutan Mattirobulu dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Bangkeng Bukit di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba di Bawah Bimbingan Muhammad Dassir dan Adrayanti Sabar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Bangkeng Bukit. Penelitian ini telah dilaksanakan sejak bulan November 2020 - Januari 2021. Tempat pelaksanaan penelitian di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif, untuk mendapatkan data dan informasi dari anggota Kelompok Tani Hutan. Pendekatan ini dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner dan penelusuran dokumen atau literature dengan menggunakan teknik purposive sampling. Partisipasi masyarakat dianalisis dengan menggunakan analisis deksriptif kualitatif yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi kedua KTH menghasilkan tingkatan yang berbeda. Partisipasi masyarakat Bukit Indah cenderung tinggi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, tetapi cenderung rendah pada tahap monitoring dan evaluasi. Sedangkan partisipasi masyarakat KTH Mattirobulu cenderung tinggi pada tahap pelaksanaan, sementara pada tahap perencanaan tergolong sedang, serta pada tahap monitoring dan evaluasi tergolong rendah.

Kata Kunci : Partisipasi, Kelompok Tani Hutan (KTH), HKm

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Partisipasi pada Dua Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Bangkeng Bukit di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba”. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi, Jurusan kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini, selalu ada hambatan yang penulis alami. Namun, berkat bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M. Si** selaku pembimbing satu yang selalu memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan meluangkan waktunya untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu **Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut. M.P. IPM** selaku pembimbing dua yang selalu memberikan saran, semangat dan dorongan, serta selalu memberikan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi di Jurusan Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak **Emban Ibnurusyid Mas’ud, S.Hut, MP** dan Ibu **Dr. Astuti Arif, S. Hut. M. Si** selaku dosen penguji yang telah memberikan saran serta masukan untuk penyusunan skripsi ini.
4. Staf dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Kehutanan atas bantuannya.
5. Sahabat seperjuangan **A. Mammah Nabirah, Faisal Sudrajat, Sri Eka Nur Ita, dan Gusti Ayu Widya** yang telah membantu dalam proses bimbingan dan penelitian di lapangan.
6. Sahabat-sahabat terkasih **Trigonometri** yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Serta segala suka maupun duka selama kuliah di Fakultas Kehutanan mulai dari MABA sampai menjadi mahasiswa tingkat akhir

7. Teman-teman Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan khususnya minat Sosial Kehutanan, yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi.
8. Teman – teman **Fraxinus** yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Semua teman - teman atau pihak - pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Terkhusus, penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada almarhum Ayahanda A. Syamsir dan kepada Ibunda A. Maemuna atas segala doa, kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan motivasi dalam mendidik dan membesarkan penulis, serta Saudara tercinta A. Muliadi, A. Amri, A. Haerul, A. Muh Nasir, A. Dewi Garnis, dan A. Nada Ashari terima kasih atas motivasi, perhatian dan dukungan yang diberikan. Semoga dihari esok, penulis kelak menjadi anak yang membanggakan untuk keluarga tercinta.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik dan semoga Allah SWT. senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Perhutanan Sosial.....	4
2.2 Hutan Kemasyarakatan.....	5
2.3 Kelompok Tani Hutan (KTH).....	8
2.4 Pengelolaan Hutan	9
2.5 Partisipasi Masyarakat	9
III. METODE PENELITIAN.....	13
3.1 Waktu dan Tempat	13
3.2 Alat dan Bahan.....	13
3.3 Metode Pelaksanaan Penelitian.....	13
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	13
3.5 Analisis Data.....	14
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
4.1 Identitas Responden Kelompok Tani Hutan.....	17
4.1.1 Umur.....	17
4.1.2 Tingkat Pendidikan.....	18
4.1.3 Penghasilan Responden.....	20

4.2 Bentuk Partisipasi KTH dalam Pengelolaan HKm.....	21
4.2.1 Partisipasi dalam Tahap Perencanaan.....	21
4.2.2 Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan.....	26
4.2.3 Partisipasi dalam Tahap Monitoring dan Evaluasi.....	29
4.3 Klasifikasi Tingkat Partisipasi KTH pada Pengelolaan HKm.....	31
4.4 Perbedaan Tingkat Partisipasi Pengelolaan HKm Bangkeng Bukit pada 2 KTH.....	34
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	36
5.1 Kesimpulan.....	36
5.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Grafik Tingkat Partisipasi KTH Bukit Indah dan KTH Mattirobulu dalam Pengelolaan HKM Bangkeng Bukit.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Distribusi Frekuensi.....	15
Tabel 2.	Klasifikasi Umur Kelompok Tani Hutan Bukit Indah.....	17
Table 3.	Klasifikasi Umur Kelompok Tani Hutan Mattirobulu.....	17
Tabel 4.	Klasifikasi Tingkat Pendidikan KTH Bukit Indah.....	19
Tabel 5.	Klasifikasi Tingkat Pendidikan KTH Mattirobulu.....	19
Tabel 6.	Klasifikasi Tingkat Penghasilan KTH Bukit Indah.....	20
Tabel 7.	Klasifikasi Tingkat Penghasilan KTH Mattirobulu.....	21
Tabel 8.	Partisipasi Responden KTH Bukit Indah dalam Perencanaan.....	24
Tabel 9.	Partisipasi Responden KTH Mattirobulu dalam Perencanaan.....	25
Tabel 10.	Partisipasi Responden KTH Bukit Indah dalam Pelaksanaan.....	28
Tabel 11.	Partisipasi Responden KTH Mattirobulu dalam Pelaksanaan.....	28
Tabel 12.	Partisipasi Responden KTH Bukit Indah dalam Monev.....	30
Tabel 13.	Partisipasi Responden KTH Mattirobulu dalam Monev.....	30
Tabel 14.	Rekapitulasi Hasil Analisis Kegiatan KTH Bukit Indah.....	31
Tabel 15.	Rekapitulasi Hasil Analisis Kegiatan KTH Mattirobulu.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Kuisisioner dan Panduan Wawancara Penelitian.....	41
Lampiran 2.	Identitas Responden, Tabulasi Data dan Tingkat Partisipasi Responden pada KTH Mattirobulu.....	45
Lampiran 3.	Identitas Responden, Tabulasi Data dan Tingkat Partisipasi Responden pada KTH Bukit Indah.....	49
Lampiran 4.	Klasifikasi Partisipasi KTH Mattirobulu.....	53
Lampiran 5.	Klasifikasi Partisipasi KTH Bukit Indah.....	55
Lampiran 6.	Dokumentasi Penelitian.....	57

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan merupakan salah satu modal sosial yang dikembangkan secara integratif melalui berbagai kegiatan kreatif dalam rangka memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara lestari dan berkelanjutan. Tingkat partisipasi masyarakat dapat tercermin dalam berbagai tahapan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan, tahapan pengelolaan terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Adapun partisipasi masyarakat pada pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat berbentuk ide/gagasan/pemikiran, biaya, maupun tenaga.

Pemanfaatan sumberdaya hutan memerlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki manajemen yang baik. Berperannya masyarakat dalam pemanfaatan hutan secara lestari dapat membantu pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan pemerintah tidak akan berjalan dengan lancar apabila kurang atau tidak adanya peran dari masyarakat setempat. Masyarakat sekitar hutan memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber mata pencaharian disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi.

Menurut data Dinas Kehutanan Bulukumba, luas hutan di Kabupaten Bulukumba adalah 8.453,25 hektar atau setara 7,32% dari luas kabupaten. Untuk

skema HKm, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 363/Menhut-II/2011 (tertanggal 7 Juli 2011) ditetapkan tiga kawasan hutan, yaitu kawasan hutan Anrang 655 hektar, Bangkeng Bukit 245 hektar dan Lompo Battang 1.365 hektar, atau total keseluruhan 2.265 hektar.

Dengan adanya pengembangan program hutan kemasyarakatan ini, masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian hutan terutama pada HKm Bangkeng Bukit yang sebagian besar masyarakatnya memiliki pekerjaan sebagai petani. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan program hutan kemasyarakatan merupakan salah satu modal sosial yang bisa dikembangkan secara integratif dalam rangka mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, meningkatkan kehidupan di pedesaan lebih produktif, mampu mempertahankan nilai-nilai budaya yang baik, mendukung sistem penguasaan dan tata guna lahan yang jelas, meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran dan tanggungjawab dalam upaya penyelamatan lahan pertanian, sehingga partisipasi masyarakat sekitar HKm Bangkeng Bukit sangat mutlak diperlukan.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan program HKm Bangkeng Bukit merupakan keterlibatan secara langsung dalam rehabilitasi hutan dengan lahan seluas 245 hektar. Dimana HKm Bangkeng Bukit ini dikelola oleh 3 desa yang masing-masing memiliki Kelompok Tani Hutan (KTH), yaitu KTH Bukit Indah (Desa Bontonyeleng), KTH Buhung Lali (Desa Bukit Harapan), KTH Mattirotulu (Desa Bukit Tinggi). Dari ketiga KTH tersebut, diketahui 2 KTH lainnya belum pernah dilakukan penelitian terkait partisipasi dalam mengelola hutan. Kedua KTH tersebut yaitu, KTH Bukit Indah dan KTH Mattirotulu. Sementara, partisipasi masyarakat Kelompok Tani Hutan dalam pengembangan program hutan kemasyarakatan (HKm Bangkeng Bukit) sangat diperlukan agar kelestarian fungsi dan kemampuan sumberdaya hutan serta ekosistemnya dapat terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika partisipasi masyarakat pada kedua KTH yang telah diberikan kepercayaan oleh

pemerintah setempat untuk mengelola hutan tersebut dengan areal pengelolaan sesuai dengan SK Bupati tentang IUPHKm.

1.2. Tujuan dan Kegunaan

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Bangkeng Bukit di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Adapun penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengelola hutan secara lestari.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial atau *Social Forestry* merupakan suatu kegiatan yang dibentuk untuk membangun hutan, memelihara tanah dan air dan pembangunan masyarakat desa dengan mengacu pada aturan-aturan tertentu di bidang teknik, ekonomi, dan sosial melalui fungsi manajemen yang relevan, yaitu perencanaan, organisasi, dan pengawasan (Departemen Kehutanan, 1987) dalam Yunasfi (2007). Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan (Sumanto, 2009).

Kementrian Kehutanan mendefinisikan Perhutanan sosial atau *Social Forestry* merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang berada pada kawasan hutan negara maupun hutan hak dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pengelolanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan hutan yang lestari. Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah untuk mewujudkan sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan secara langsung agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat didalam pengelolaan hutan (Dephut, 2003).

Tujuan program perhutanan sosial adalah untuk merehabilitasi lahan kritis, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan meningkatkan kualitas lingkungan. Oleh karenanya, program perhutanan sosial banyak dilakukan pada kawasan lahan yang terdegradasi dan kawasan hutannya ditanami dengan tanaman semusim atau tanaman tahunan secara monokultur (Murniati dan Sumarhani, 2010).

Menurut Simon (2006) dalam Asmin (2016), ada 5 tahapan yang harus dikerjakan dalam kerangka strategi perhutanan sosial, adalah:

1. Memahami karakter wilayah secara sosial budaya, ekonomi dan ekologis.
2. Mengidentifikasi subsistem yang mempengaruhi pembangunan wilayah.
3. Melakukan kajian berupa *means and values*.

4. Menentukan tujuan pengelolaan yang akan dilakukan.
5. Menentukan regime pengelolaan.

Strategi pokok pengembangan *social forestry* adalah sebagai berikut (Hakim, 2010):

1. Kelola kawasan, kegiatan ini merupakan kegiatan prakondisi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *social forestry* dalam rangka optimalisasi pemanfaatan hasil hutan.
2. Kelola kelembagaan, dilaksanakan melalui upaya penguatan organisasi, penetapan aturan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
3. Kelola usaha, dilaksanakan melalui kemitraan dengan pertimbangan hak dan tanggung jawab. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung perkembangan usaha di areal kerja *social forestry*.

2.2. Hutan Kemasyarakatan

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya, dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat (Kardan, 2007)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.88/Menhut-II/2014 mendefinisikan Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Proses pemberdayaan masyarakat dalam hutan kemasyarakatan tersebut dimaksudkan agar pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat yang mengelola hutan secara lestari dapat dijamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga tujuan dari hutan kemasyarakatan dapat terpenuhi. Terkait dengan pernyataan diatas paradigma pembangunan kehutanan yang tersentralisasi menuju pembangunan kehutanan yang mengutamakan kontrol dan keputusan dari masyarakat lokal, mengubah sikap dan keterampilan rimbawan dari pelindung

hutan terhadap gangguan manusia menjadi bekerja bersama masyarakat. Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan bentuk perhutanan sosial (*social forestry*).

Menurut Roslinda (2008), konsep Hkm timbul dilatarbelakangi oleh berubahnya paradigma pembangunan kehutanan, yakni dari “*State Based Forest Management*” (SBFM) menjadi “*Community Based Forest Management*” (CBFM) dan dari “*Timber Management*” menjadi “*Ecosystem Management*”. Pendekatan CBFM ini merupakan wujud dari *paradigm social forestry* (kehutanan sosial), yang tidak saja terjadi di Indonesia melainkan di seluruh dunia. Konsep Hutan Kemasyarakatan ini timbul sesuai dengan perubahan konsep dan strategi pembangunan pada negara-negara berkembang pada umumnya. Ada tiga asumsi dasar yang mendorong ke arah perubahan kebijaksanaan kehutanan yang lebih memperhatikan masyarakat pedesaan (*rural community*) dan pembangunan pedesaan “*rural development*”:

1. Sektor Kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan sekitar hutan, yang hidupnya tergantung pada interaksi dengan hutan dan tanah hutan.
2. Sekitar kehutanan dan para rimbawan harus mengintergrasikan dengan sektor-sektor lain, dan perlunya faktor-faktor luar sektor kehutanan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan kehutanan.
3. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat sekitar hutan pada program kehutanan merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program-program tersebut.

Menurut (Karden, 2007) pengusaha hutan kemasyarakatan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat
2. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat pengusaha hutan kemasyarakatan
3. Mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian dan fungsi serta manfaat hutan
4. Meningkatkan mutu, produktivitas, dan keamanan hutan
5. Menciptakan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan Negara

6. Mendorong dan mempercepat wilayah

Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial. Hkm bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Sanjaya, 2016).

Santoso (2011), menjelaskan bahwa kawasan yang dapat dijadikan sebagai kawasan HKm yaitu hutan lindung dan hutan produksi, melalui HKm masyarakat dapat memanfaatkan hutan selama jangka waktu 35 tahun. Prinsip-prinsip hutan kemasyarakatan yang dikembangkan lebih berpihak kepada masyarakat yakni:

1. Masyarakat sebagai pelaku utama
2. Masyarakat sebagai pengambil keputusan
3. Kelembagaan perusahaan ditentukan oleh pengambil keputusan
4. Kepastian hak dan kewajiban semua pihak
5. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau program
6. Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya

Menurut Elisabeth (2017), menyatakan bahwa hutan kemasyarakatan sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan kepentingan kesejahteraan masyarakat, produktivitas sumber daya hutan dan kelestarian fungsi hutan merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam pengelolaan hutan. Melalui konsep ini bisa lebih luas dijabarkan dalam pola-pola manajemen lahan hutan yang mampu secara efektif melibatkan masyarakat secara langsung dalam sistem pengelolaan hutan, memberikan kontribusi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat, secara teknis mampu meningkatkan produktivitas sumberdaya hutan dan secara ekologis mampu menjamin kelestarian fungsi hutan.

2.3. Kelompok Tani Hutan (KTH)

Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan orang yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan

sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Penumbuhan dan pengembangan poktan dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usahatannya dan meningkatkan kemampuan poktan dalam melaksanakan fungsinya. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok (Sanjaya, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan, bahwa KTH merupakan kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia berserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir.

Sanudin, dkk (2016) menyatakan bahwa fungsi kelompok tani hutan yaitu sebagai wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik selain itu, menjadi tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain.

Sanjaya (2016), menyatakan bahwa melalui kerjasama diharapkan usaha yang dilaksanakan dapat lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan, dan menjadi unit produksi yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani hutan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

2.4 Pengelolaan Hutan

Rujukan pengelolaan hutan terdapat pada UU Nomor 41 Tahun 1999, dimana pengelolaan hutan meliputi kegiatan: 1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; 2) Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; 3) Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan 4) Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Berdasarkan fungsi manajemen, tahapan pembangunan HKm yaitu, *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengendalian). Sedangkan partisipasi masyarakat baik dalam bentuk pemikiran maupun tenaga atau jasa dituangkan dalam 3 (tahapan) pembangunan HKm yaitu: (1) Tahap perencanaan meliputi: pemilihan jenis, penentuan lokasi garapan, musyawarah-musyawarah, pelatihan teknis dan manajemen, pembentukan kelembagaan (Pengorganisasian) HKm, (2) Tahap pelaksanaan meliputi: persiapan lahan, persiapan bahan tanaman, penanaman, pemeliharaan (penyulaman, pemupukan, penyiangan dan penanggulangan hama dan penyakit), (3) Tahap pengendalian meliputi: monitoring dan evaluasi hasil pekerjaan, pertumbuhan tanaman dan kinerja kelompok tani HKm

2.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu ciri gerakan pembangunan masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dikehendaki tidak hanya dalam tahap pelaksanaan saja, akan tetapi justru pada penetapan atau perencanaan kegiatan dan penetapan hasil. Ikut aktifnya masyarakat dalam penetapan atau perencanaan suatu kegiatan mengakibatkan warga masyarakat akan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari kegiatan tersebut (Aminullah, 2002).

Konsep partisipasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana petani hutan kemasyarakatan terlibat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, seberapa tinggi keterlibatannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tingkat partisipasi petani dapat tercermin dalam berbagai tahapan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan Tahapan pengelolaan terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Partisipasi petani pada pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat berbentuk ide/gagasan/pemikiran, biaya, maupun tenaga (Sagita dkk, 2019).

Sutrisno (1995), mengemukakan 2 definisi partisipasi yang berkembang di masyarakat yaitu:

1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana atau proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam

pembangunan dapat diukur dalam kemana rakyat itu menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang ataupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah

2. Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk membangun biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dipakai dalam definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara sendiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu.

Menurut Djuhendi (2000) jika dicermati, makna partisipasi berbeda-beda menurut mereka yang terlibat, misalnya antara pengambil kebijakan, pelaksana di lapangan, dan masyarakat. Para ahli telah mampu membuat pengklasifikasian partisipasi. Misalnya ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi, yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal, yaitu:

1. *Partisipasi manipulatif*. Partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan penempatan wakil masyarakat dalam suatu lembaga resmi, namun wakil tersebut tidak dipilih oleh masyarakat itu sendiri dan tidak memiliki kewenanganyang jelas. Artinya, masyarakat diwakili oleh ‘lembaga boneka’ yang sama sekali tidak representatif.
2. *Partisipasi pasif*. Masyarakat diberitahu tentang hal-hal yang sudah jadi, ini merupakan tindakan sepihak dari administrator atau manajer proyek tanpa menghiraukan tanggapan masyarakat yang bersangkutan. Sumber informasi yang dihargai oleh administrator atau manajer proyek tersebut adalah pendapat para professional.
3. *Partisipasi konsultatif*. Masyarakat dimintai tanggapan atas suatu hal. Pihak luar yang merumuskan permasalahan, mengumpulkan informasi, dan melakukan analisis. Bentuk konsultasi tersebut tidak melibatkan masyarakat

dalam proses pengambilan keputusan dan pihak luar itu pada dasarnya tidak berkompeten untuk mewakili pandangan masyarakat.

4. *Partisipasi dengan imbalan material*. Masyarakat berpartisipasi dengan cara memberikan kontribusi sumberdaya yang dimilikinya, misalnya sebagai tenaga kerja, untuk memperoleh imbalan makanan, uang tunai, maupun imbalan material lainnya. Masyarakat boleh jadi menyediakan lahan dan tenaga kerjanya, namun tidak terlibat dalam proses eksperimentasi dan proses pembelajaran. Proses inilah yang selama ini lazim disebut sebagai partisipasi. Dalam konteks seperti itu, masyarakat tidak memiliki pijakan untuk melanjutkan kegiatannya tatkala imbalan dihentikan.
5. *Partisipasi fungsional*. Partisipasi masyarakat dipandang oleh pihak luar sebagai cara untuk mencapai tujuan proyek, khususnya untuk mengurangi biaya. Masyarakat membentuk kelompok yang sesuai dengan tujuan proyek yang telah ditetapkan sebelumnya. Keterlibatan tersebut boleh jadi bersifat interaktif dan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, namun hal itu cenderung terjadi setelah keputusan pokoknya telah dibuat oleh pihak luar. Lebih buruk lagi, masyarakat lokal tetap sekedar dijadikan sebagai pelayan untuk merealisasikan tujuan-tujuan eksternal.
6. *Partisipasi interaktif*. Masyarakat berpartisipasi dalam tahapan analisis, pengembangan rencana kegiatan dan dalam pembentukan dan pemberdayaan institusi lokal. Partisipasi dipandang sebagai hak dan bukan sekedar sebagai cara untuk mencapai tujuan proyek. Proses tersebut melibatkan metodologi yang multidisiplin yang membutuhkan perspektif yang majemuk serta membutuhkan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur. Sebagai kelompok, masyarakat memegang kendali sepenuhnya atas keputusan-keputusan lokal dan kebijakan tentang pendayagunaan sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian masyarakat memiliki kewenangan yang jelas untuk memelihara struktur dan kegiatannya.
7. *Partisipasi inisiatif (mobilisasi swakarsa)*. Masyarakat mengambil inisiatif secara mandiri untuk melakukan perubahan sistem. Mereka membangun hubungan konsultatif dengan lembaga eksternal mengenai masalah sumberdaya dan masalah teknis yang mereka butuhkan, tetapi tetap

memegang kendali menyangkut pendayagunaan sumberdaya. Partisipasi seperti ini akan berkembang pesat jika pemerintah dan LSM menyediakan kerangka kerja pendukungnya. Partisipasi ini barangkali tidak akan mengganggu distribusi kesejahteraan dan kekuasaan masyarakat.